

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KOTA MATARAM
(STUDI DI KELURAHAN JEMPONG BARU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh
SEBTIARA SYAHRANI KROSBY
NIM.2020B1B016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2024**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MATARAM (STUDI DI KELURAHAN JEMPONG BARU)

Sebtiara Syahrani Krosby¹, Siti Atika Rahmi², Rahmad Hidayat³

ABSTRAK

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktor secara lintas generasi, banyak orang yang mengira tinggi atau pendek badan seorang anak karena faktor genetik. Kesalahan tanggapan dari masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait, untuk menekankan masalah stunting di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram menjalankan kebijakan dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kelurahan Jempong Baru menjadi wilayah dengan angka kasus stunting paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram khususnya di Kelurahan Jempong Baru. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di kelurahan Jempong Baru belum berjalan dengan optimal. Dapat dilihat dari kasus stunting dua tahun terakhir yakni pada tahun 2022 (25,93%), dan pada tahun 2023 turun menjadi (16,73%). Namun angka stunting tersebut masih jauh dari yang ditetapkan pemerintah yakni dibawah 5%. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dengan baik seperti: sikap dan kecenderungan para pelaksana belum tercapai, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana belum optimal, dan faktor lingkungan dan sosial belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Stunting, Terintegrasi.

**THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION
ACCELERATION POLICY IN MATARAM CITY
(A STUDY IN JEMPONG BARU VILLAGE)**

Sebtiana Syahrani Krosby¹, Siti Atika Rahmi², Rahmad Hidayat³

ABSTRACT

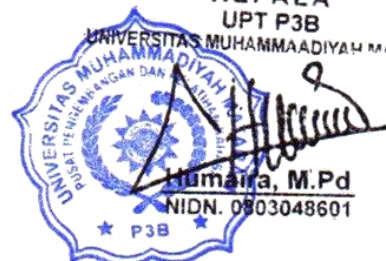
Many people wrongly attribute a child's height to inherited causes, although stunting is a chronic nutritional condition caused by complex intergenerational variables. The government and other entities need to pay extra attention to this misperception. The municipal authority of Mataram City has put the NTB Governor Regulation No. 68 of 2020 on Integrated Stunting Prevention and Acceleration Actions into effect in order to combat stunting. When compared to other villages in Mataram City, Jempong Baru Village has the highest rates of stunting. The goal of this study is to examine how Mataram City, namely Jempong Baru Village, has been executing the integrated stunting prevention acceleration policy. The research utilizes a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, documentation, and observation. Informants were selected using purposive sampling. Data sources include primary and secondary data. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the integrated stunting prevention acceleration policy in Jempong Baru Village has not yet been optimal. This can be seen from the stunting cases in the past two years, which were 25.93% in 2022, and decreased to 16.73% in 2023. However, these rates are still far from the target set by the Mataram City government, which is below 5%. Based on the analysis using the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, several indicators have not been well achieved, such as: the attitudes and tendencies of implementers have not been fully met, inter-organizational communication and implementer activities are not optimal, and environmental and social factors have not fully supported the implementation of the integrated stunting prevention acceleration policy.

Keywords: Implementation, Stunting, Integrated

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan memerlukan perhatian khusus (Essa et al., 2021). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang bersifat multifactorial dan multigenerasi. Banyak orang yang mengira tinggi atau pendek badan seorang anak karena factor genetik (Budiastutik & Nugraheni, 2018). Kesalahan tanggapan dari masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait (Sari et al., 2010). Stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lambat akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama (Sari et al., 2010), dapat menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang akibat malnutrisi, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang dinyatakan dengan nilai Z-score indeks TB/U <-2 SD (Sari et al., 2010); (Departemen, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan angka stunting yang relatif tinggi dibandingkan negara berpendapatan menengah lainnya (Bedasari et al., 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 presentase angka kejadian stunting pada anak dibawah usia 5 tahun (balita) sebesar 21,6%, artinya masih ada sekitar 5 juta anak yang mengalami stunting atau gagal pertumbuhan (Kemenkes, 2022).

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikerdas), status gizi balita stunting di Indonesia menunjukkan angka stunting secara nasional terus menurun dari 24,4% pada tahun 2021 turun menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Namun angka stunting tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka stunting maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20% (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022).

Tingginya angka kasus stunting secara nasional mendorong pemerintah pusat untuk terus berupaya menurunkan angka kasus stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, untuk membuat komitmen pemerintah dalam perbaikan gizi khususnya penurunan stunting dan gizi buruk (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan organisasi peserta untuk meningkatkan angka prioritas gizi masyarakat menjadi 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memperkuat pelaksanaan program pencegahan stunting di 100 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan kerangka *intervensi gizi spesifik* dan *sensitive gizi yang spesifik*, konsep penanganan permasalahan gizi yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan berpotensi menurunkan risiko *stunting*. Kelompok sasaran utama *intervensi gizi spesifik* adalah bayi dengan HPK dibawah 1000. Sedangkan *intervensi sensitive gizi*

merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting melalui program kegiatan non-esensial (TNP2K, 2017).

Untuk mengurangi permasalahan stunting di NTB, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan kebijakan pencegahan stunting, melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditangani secara multidisiplin.

Adapun penyebab terjadinya stunting tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan saja, namun juga pada sektor non-kesehatan yang sensitive terhadap gizi, seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, asuransi kesehatan, dan lain-lain (Ch Rosha et al., 2016). Sehingga apabila terjadi stunting dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik dan produktivitas ekonomi. Dan kondisi tersebut akan menghambat momentum generasi emas Indonesia tahun 2045 jadi harus segera diatasi (Bedasari et al., 2021).

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di NTB pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-4 dari 34 provinsi dengan tingkat pertumbuhan stunting sebesar 32%, dan angka stunting di Kota Mataram termasuk tinggi, yaitu sebesar 24,8%. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka stunting di Kota Mataram tinggi dan jauh dari target pemerintah yaitu kurang dari 20%, maka pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan sebanyak 11 puskesmas di Kota Mataram yang menjadi titik lokus pencegahan stunting yakni; Puskesmas Dasan Agung,

Puskesmas Karang Pule, Puskesmas Cakranegara, Puskesmas Seleparang, Puskesmas Pagesangan, Puskesmas Karang Taliwang, Puskesmas Babakan, Puskesmas Mataram, Puskesmas Ampenan, Puskesmas Pejeruk, Puskesmas Tanjung Karang dengan total keseluruhan kasus stunting tercatat sekitar 15,66% atau sekitar 3,999 balita kerdil ditahun 2023, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan hasil penimbangan balita pada tahun 2022 sebesar 17,13%.

Tabel 1.1 Daftar Stunting Pada Puskesmas di Kota Mataram

No	Puskesmas	Jumlah Stunting
1	Karang Pule	714
2	Cakranegara	679
3	Tanjung Karang	439
4	Babakan	385
5	Pagesangan	373
6	Seleparang	276
7	Mataram	272
8	Ampenan	249
9	Pejeruk	246
10	Karang Taliwang	192
11	Dasan Agung	174
	Total	3.999

Sumber: Puskesmas Karang Pule, Februari 2023

Selanjutnya, berdasarkan hasil tabel 1.1 diatas, penentuan titik lokus stunting di Kota Mataram intervensi tahun 2023, menunjukkan terdapat 5 puskesmas di Kota Mataram dengan kasus stunting tertinggi sampai terendah

yakni pada Puskesmas Karang Pule sebanyak 714 balita, Puskesmas Cakranegara sebanyak 697 balita, Puskesmas Tanjung Karang sebanyak 439 balita, Puskesmas Babakan sebanyak 385 balita, dan Puskesmas Pagesangan sebanyak 373 balita. Maka berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan Puskesmas Karang Pule paling tinggi jumlah kasus stunting diantara puskesmas lainnya yang berada di Kelurahan Kota Mataram. Data detail kasus stunting di Desa/Kelurahan Sekarbela dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2 Daftar Kasus Stunting di Kelurahan/Kecamatan Sekarbela

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Stunting
1	Kekalik Jaya	15
2	Tanjung Karang	115
3	Tanjung Karang	84
4	Jempong Baru	365
5	Karang Pule	135
	Total	714

Sumber: Puskesmas Karang Pule, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 daftar stunting di Kecamatan Sekarbela pada data diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Jempong Baru paling tinggi kasus angka stunting diantara kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Sekarbela, dengan kasus angka stunting sebanyak 365 balita stunting. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arieska, 2023) tentang peningkatan pengetahuan dan sikap oarangtua balita ke posyandu di lingkungan Jempong Baru wilayah kerja Puskesmas Karang Pule, menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan pengetahuan pada kelompok intervensi sebesar 1,94 sedangkan peningkatan rata-rata sikap orangtua balita

didapatkan 5,25 dan didapatkan $p=0,000$ ($p<0,005$) baik pengetahuan maupun sikap orangtua balita.

Berdasarkan permasalahan diatas maka, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram dengan menggunakan model kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn serta indikator capaian lingkungan *eksternal* yang dianggap relevan dengan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram, khususnya di Kelurahan Jempong Baru.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram, khususnya di Kelurahan Jempong Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

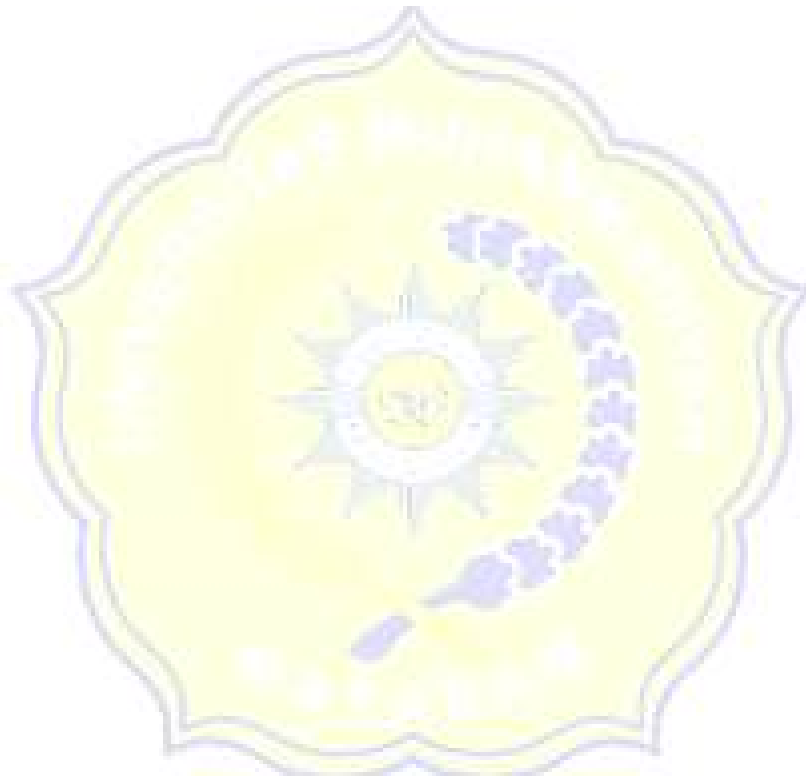
1.4.1 Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan referensi

bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah yang sama, serta untuk menambah literatur bagi kalangan akademisi terkait dalam kebijakan dan pelayanan publik.

1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dan sumbangan pikiran pada instansi terkait sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan menyusun program kerja

1.4.3 Secara Akademisi, bermanfaat untuk memperluas atau menambah wawasan dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kebijakan publik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram Kelurahan Jempong Baru belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn terdapat indikator-indikator pencapaian yang belum berjalan dengan baik yakni: (disposisi) sikap atau kecenderungan para pelaksana belum tercapai dengan baik dilihat dari pemahaman kebijakan hanya sebatas OPD saja, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana masih kurang dalam hal komunikasi dengan masyarakat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dan faktor lingkungan sosial dan ekonomi yang di lingkungan Jempong Baru belum sepenuhnya mendukung keberhasilan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.

5.2 Saran

Untuk mengurangi angka stunting di kota Mataram dan menjadikan generasi emas pada tahun yang akan datang, diharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di kota Mataram, dan instansi terkait serta, seluruh masyarakat agar bersama-sama menjadikan kota Mataram bebas dari stunting. Maka, perlu diintervensi lagi terkait terkait pemahaman masyarakat tentang stunting dengan memberikan lebih banyak edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah karena mereka merupakan generasi emas yang akan melanjutkan generasi. Juga untuk komunikasi bersama masyarakat harus

lebih ditingkatkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku. Dan untuk faktor ekonomi diharapkan agar pemerintah membuka lapangan kerja agar status sosial di lingkungan Jempong Baru bisa lebih rendah.

